

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pada tahun 1970 pembangunan hanya dipandang sebagai fenomena semata. Namun berdasarkan pengalaman tersebut menunjukkan sebagian besar penduduk tidak dijamin oleh tingginya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Laporan yang diterbitkan oleh Bank Dunia pada tahun 1991 yang menjelaskan “tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan” Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan istitusi-institusi nasional. Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pertumbuhan ekonomi. (Syahrani, 2018).

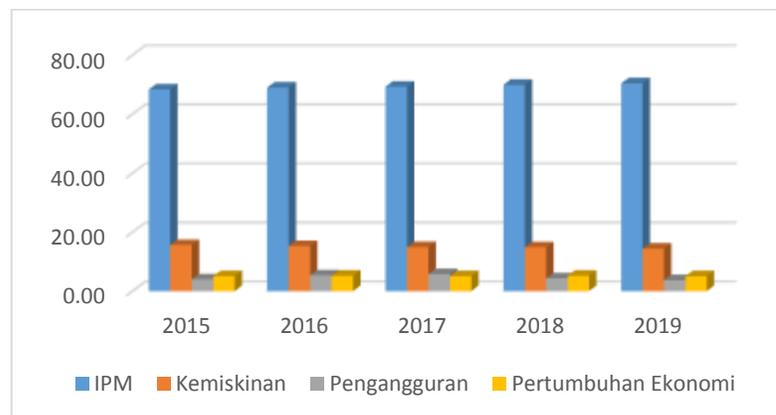
Kehidupan yang sejahtera merupakan kehidupan yang diinginkan oleh semua manusia. Namun, tidak semua orang dapat merasakan hidup secara sejahtera. Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah dalam suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya yaitu dengan melakukan pembangunan, salah satunya pada bidang ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi menjadi indikatornya. (Ningrum, Khairunnisa, and Huda 2020).

Sebagaimana yang dikatakan Siti Fatimah (Fatimah 2013). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu alat ukuran kinerja keberhasilan pembangunan dari aspek manusia pada suatu wilayah tertentu melalui UNDP (*United Nation of Development Program*). Dengan kesepakatan yang dibuat UNDP dapat

diterapkan dalam pengukuran pada suatu wilayah tertentu baik Negara, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jumlah pengangguran merupakan efek yang ditimbulkan oleh ketersediaan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi dari hasil studi *cross country* menemukan adanya bukti hubungan positif terhadap pembangunan manusia melalui aktivitas rumah tangga dan pemerintah.

Rata – rata indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran digunakan sebagai alat ukur dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia. ketiga indeks tersebut dihitung dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan dalam mengetahui perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Aspek yang perlu diperhatikan dalam melihat kemajuan pembangunan manusia adalah aspek kecepatan dan status pencapaian (BPS Kabupaten Ngawi 2019).

**Gambar 1.1 Grafik Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Ngawi Tahun 2015-2019**



Sumber: BPS Kabupaten Ngawi; Diolah, 2021

Berdasarkan gambar grafik 1.1 dapat dilihat bahwa nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Ngawi pada tahun 2015 hingga 2019 mengalami

kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya berbanding lurus dengan target pembangunan yang telah terencana. Kondisi diatas juga sejalan dengan salah satu tujuan pemerintah daerah yaitu meningkatkan angka IPM tetap positif, sebagai bentuk pencapaian target pembangunan (Zakaria, 2018).

Berdasarkan kategori yang diberikan oleh UNDP, yakni capaian pembangunan manusia dikategorikan menjadi kategori sangat tinggi ( $IPM \geq 80$ ), kategori tinggi ( $70 \leq IPM < 80$ ), kategori sedang ( $60 \leq IPM < 70$ ), dan kategori rendah ( $IPM < 60$ ). Dapat disimpulkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Ngawi pada periode 2015 hingga 2019 termasuk dalam kategori sedang. Pembangunan manusia di Kabupaten Ngawi bisa dikatakan sedang, karena tingkat pertumbuhan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Ngawi masih berada di antara angka 60-70% setiap tahunnya.

Dalam konteks pembangunan manusia, masalah kemiskinan semakin menjadi primadona sejak krisis ekonomi melanda Indonesia. Maka dari itu kemiskinan saat ini jadi sering didiskusikan karena peningkatan jumlah penduduk semakin tinggi. Kemiskinan sangat berhubungan erat dengan pembangunan manusia dikarenakan kemiskinan menjadi tolak ukurnya.

Suatu pengukuran kemiskinan yang lazim digunakan biasanya untuk melihat fenomena yang terjadi disuatu daerah, fenomena yang biasanya sering terjadi atau berpengaruh terhadap kemiskinan adalah pendapatan dan kesehatan. Dimana fenomena pendapatan berkaitan dengan kesejahteraan yang dicapai oleh penduduk karena dengan adanya pendapatan penduduk bisa memenuhi kebutuhannya untuk proses

keberlangsungan hidup. Kabupaten Ngawi merupakan termasuk dalam urutan 10 Kabupaten/Kota termiskin di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah warga miskin sebanyak 1,47% dari total populasi penduduk yang ada, hal ini dikarenakan kurang meratanya distribusi pangan di Kabupaten Ngawi. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Ngawi terus mengalami penurunan dari 5 tahun terakhir. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan di Kabupaten Ngawi pada tahun 2015 sebesar 129,32 ribu jiwa dan pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ngawi mengalami penurunan diangka 119,43 ribu jiwa. Dengan menurunnya tingkat kemiskinan yang terus menerus setiap tahunnya diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan cara melakukan distribusi bantuan kepada masyarakat miskin.

Pengangguran merupakan salah satu indikator yang digunakan suatu negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara mengurangi jumlah pengangguran sebagai upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) yang berkualitas dengan banyaknya masyarakat yang berkualitas diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas juga sehingga dapat menjadi modal dalam peningkatan indeks pembangunan manusia. Peningkatan indeks pembangunan manusia akan berakibat pembangunan ekonomi yang baik yang akan membuat Kabupaten Ngawi lebih maju dan agar dapat dikatakan baik.

Tingkat pengangguran di Kabupaten Ngawi pada tahun 2010-2019 cenderung fluktuatif. Jumlah pengangguran di Kabupaten Ngawi pada tahun 2010 sebesar 4,80 persen dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2014 sebesar 5,10 persen, kemudian pada tahun 2019 tingkat pengangguran di Kabupaten Ngawi

menurun sampai dengan 3,70 persen. Jumlah pengangguran yang menunjang kesejahteraan masyarakat diantaranya terjadi karena kurang tersedianya lapangan kerja yang memadai di wilayah setempat. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan di Kabupaten yang hanya sampai tamat SMA sederajat, mengakibatkan rendahnya kualitas yang dimiliki masyarakat.

Menurut BPS Kabupaten Ngawi, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ngawi dari tahun 2010 hingga 2019 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,72 persen dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2013 sebesar 6,63 persen. Sedangkan ditahun 2013 hingga 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi mengalami penurunan. Pada tahun 2013 sebesar 6,63 persen, sedangkan di tahun 2019 sebesar 5,05 persen.

Tidak meratanya pembangunan ekonomi setiap daerah diakibatkan oleh perbedaan kebutuhan serta tingkat kualitas hidup layak. Hal utama bagi pembangunan ekonomi suatu daerah yaitu pembangunan manusia itu sendiri, sehingga indeks pembangunan manusia (IPM) harus di tingkatkan. Dalam peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, jika dilihat dari BPS angka kemiskinan, pengangguran, dan angka pertumbuhan ekonomi terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini, menjadi bukti bahwa pemerataan pembangunan dapat dikatakan belum merata secara maksimal.

Pemerintah Kabupaten Ngawi mempunyai visi misi mewujudkan kondisi masyarakat yang layak dalam kemandirian ekonomi dan daya saing. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Ngawi mewujudkan peningkatan pembangunan manusia guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menanggulangi kemiskinan secara terpadu

di Kabupaten Ngawi. Pemerintah Ngawi juga merancang program bina masyarakat yang bertujuan agar masyarakat ngawi memiliki nilai etos kerja serta mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Ngawi (Pemerintah Kabupaten Ngawi, 2020). Berdasarkan uraian di atas, maka dalam Penelitian ini akan dilihat sejauh mana pengaruh faktor kemiskinan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Ngawi. Oleh Karena itu, Penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Ngawi”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Ngawi tahun 2010 sampai dengan tahun 2019?
2. Bagaimana pengangguran berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Ngawi tahun 2010 sampai dengan tahun 2019?
3. Bagaimana pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Ngawi tahun 2010 sampai dengan tahun 2019?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Ngawi tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengangguran berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Ngawi tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
3. Untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Ngawi tahun 2010 sampai dengan tahun 2019.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur pada periode tahun 2010-2019.

Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi indeks pembangunan manusia (IPM) di wilayah Kabupaten Ngawi. Penelitian ini menggunakan variabel tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen (bebas) dan variabel indeks pembangunan

manusia (IPM) sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan terutama dalam bidang ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan Kabupaten Ngawi pada khususnya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu studi empiris yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.